

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

RKPD sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam BAB III. Pada bagian ini sebagaimana arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk perubahan Tahun 2018 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2017, proyeksi Tahun 2018 dan Tahun 2019. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan kondisi pembangunan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2017.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan RKPD tahun ke-2 RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2019 diharapkan mampu mencapai misi ke-5 RPJMD yakni meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Secara detail, misi ke-2 bermakna pembangunan ekonomi Banten melalui peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi perikanan, penataan destinasi wisata, pembangunan pusat distribusi provinsi, peningkatan akses modal dan pasar untuk koperasi, industri kecil dan ekonomi kreatif, peningkatan pelayanan perijinan bagi investor, peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja, dan pengawasan, serta penempatan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Empat indikator utama yang mewakilinya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Target Pembangunan Ekonomi Banten Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.00	6.20	6.40	6.70	7.00
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.45	8.20	7.95	7.68	7.40
Angka Kemiskinan	Persen	5.13	5.00	4.87	4.74	4.60
Gini Ratio	Poin	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37

Sumber : RPJMD Banten 2017-2022

Angka-angka target pembangunan ekonomi tersebut sangat optimis karena dibuat pada awal perencanaan dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional dalam kondisi baik.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

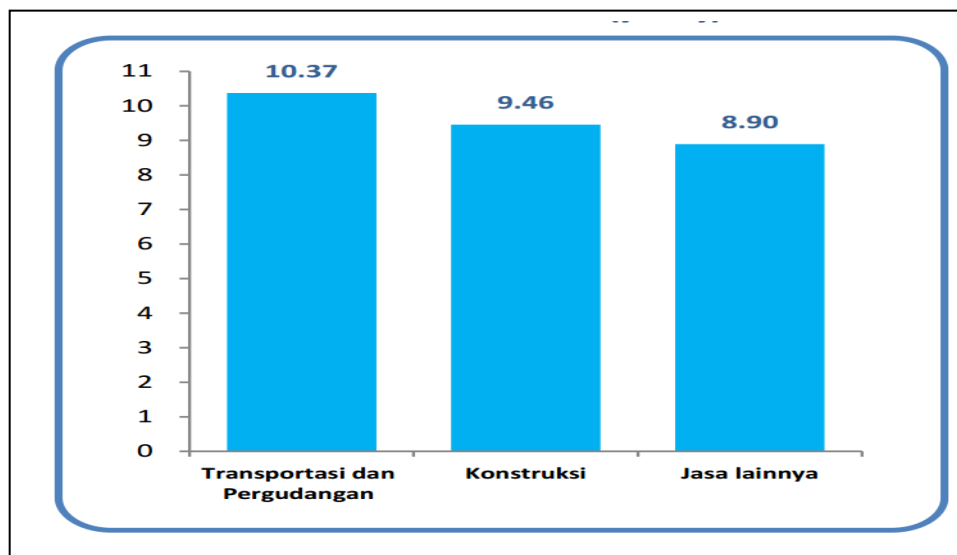
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Banten menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal, dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi Banten yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan.

1. PDRB menurut Lapangan Usaha

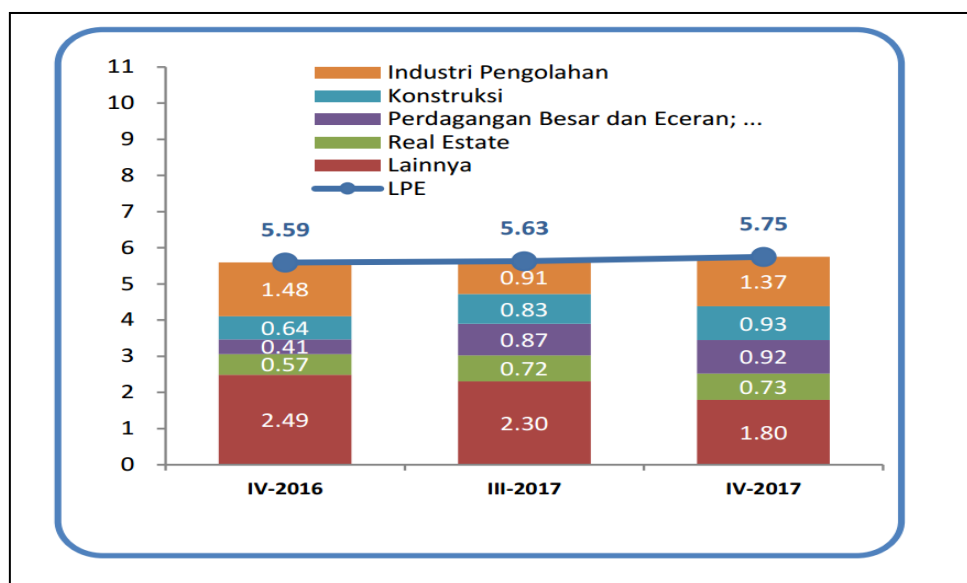
Perekonomian Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2017 mencapai Rp 146,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 104,97 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,75% dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 10,37 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,34 persen dan 1,95 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh transportasi dan pergudangan sebesar 10,37 persen, diikuti konstruksi sebesar 9,46 persen, dan jasa lainnya sebesar 8,90 persen.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulanan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Gambar 3.2
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha
Triwulanan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Struktur PDRB Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan transportasi dan pergudangan masih mendominasi PDRB Banten.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV-2017, industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,37 persen, diikuti konstruksi sebesar 0,93 persen, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,92 persen, real estate sebesar 0,73 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar 0,67 persen.

2. PDRB menurut Pengeluaran

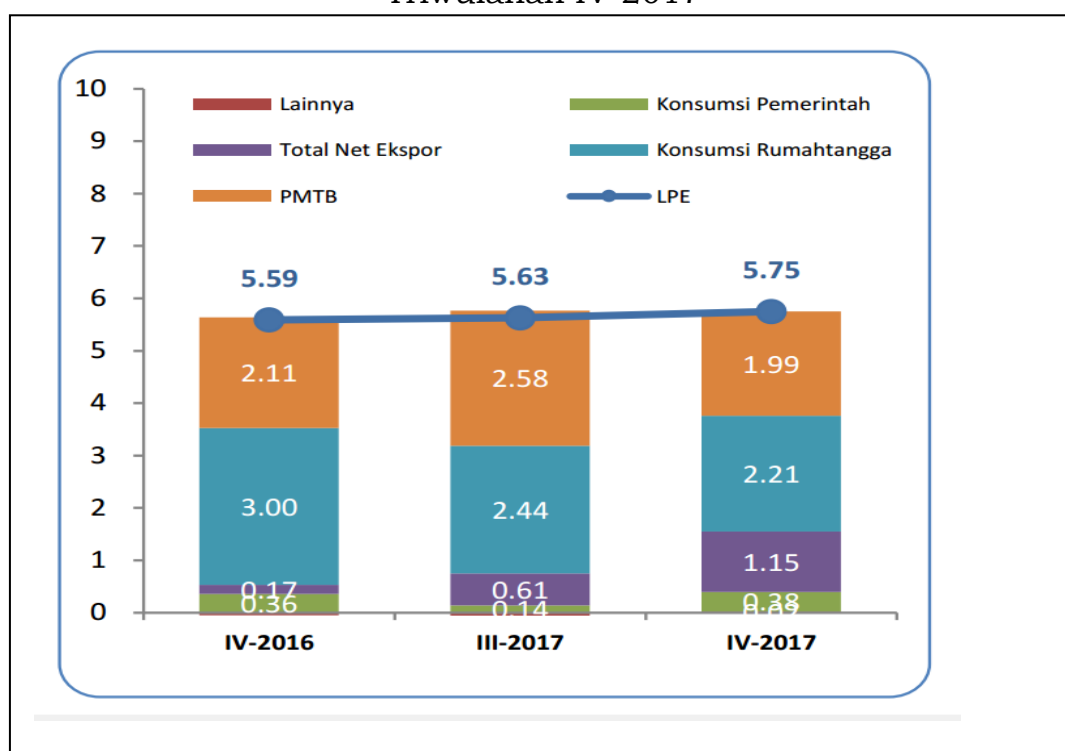
Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV-2017 terhadap triwulan IV-2016 terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 23,71 persen, diikuti komponen konsumsi pemerintah sebesar 6,89 persen, dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 6,35 persen.

Struktur PDRB Banten menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten atau sebesar 51,14 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berurutan adalah Komponen PMTB sebesar 31,34 persen, Total Net Ekspor sebesar 11,24 persen, dan pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,77 persen, sedangkan peranan Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) dan perubahan inventori relatif kecil yaitu kurang dari 1 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan IV 2017, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan andil tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 2,21 persen, diikuti Komponen Pengeluaran PMTB sebesar 1,99 persen, dan komponen Total Net Ekspor yang memberikan andil sebesar 1,15 persen.

Gambar 3.3
Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen
Triwulanan IV-2017



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Tabel 3.2
Struktur PDRB Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 dan 2017 (Persen)

Lapangan Usaha (1)	2016			2017		
	Tri II-2016 (2)	Tri III-2016 (3)	Tri IV-2016 (4)	Tri II-2017 (5)	Tri III-2017 (6)	Tri IV-2017 (7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,07	6,30	5,77	6,04	6,16	4,99
B. Pertambangan dan Penggalian	0,80	0,78	0,77	0,73	0,73	0,71
C. Industri Pengolahan	32,59	32,36	32,32	32,00	31,44	31,60
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,46	2,14	2,16	2,16	2,08	2,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	10,02	10,28	10,75	10,05	10,57	11,12
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,32	12,13	12,09	12,34	12,32	12,26
H. Transportasi dan Pergudangan	10,46	10,87	10,88	10,80	10,89	11,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,35	2,38	2,42	2,38	2,39
J. Informasi dan Komunikasi	3,52	3,55	3,55	3,68	3,68	3,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	3,03	3,06	3,00	2,98	3,04
L. Real Estate	7,18	7,16	7,16	7,45	7,50	7,44
M,N. Jasa Perusahaan	1,04	1,04	1,05	1,08	1,08	1,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,07	2,03	2,02	2,06	2,03	2,02
P. Jasa Pendidikan	3,28	3,21	3,23	3,34	3,32	3,40
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,15	1,16	1,17	1,19	1,20
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,56	1,54	1,58	1,61	1,59	1,61
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 12/02/36/Th.XII, 5 Februari 2018

Perkembangan PDRB Provinsi Banten mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Provinsi Banten semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB Provinsi Banten ini disebabkan berbagai faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB Provinsi Banten adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi Provinsi Banten baik industri, pariwisata, perdagangan, ataupun pendidikan.

Selain itu jumlah industri dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendukung dari pertambahan PDRB Provinsi Banten. Selain faktor internal tersebut faktor eksternal juga dapat mempengaruhi PDRB Banten seperti *regional spillover* atau pengaruh daerah batas. Perkembangan daerah perbatasan atau daerah sekitar Banten tersebut juga akan dapat

berpengaruh positif atau dapat menjadi faktor pendorong tumbuhnya PDRB Banten.

Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi *Renaissance* Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di Banten. Peningkatan PDRB tersebut harus dilandasi semangat *Renaissance* Provinsi Banten, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subjek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan.

Target laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh menjadi 6,8-7,0% pada Tahun 2017 sebagai tahun akhir dari RPJMD Provinsi Banten 2012-2017. Sedangkan pertumbuhan masing-masing Kabupaten/Kota ditunjukkan pada Tabel 3.4. Kota Tangerang dan Kota Cilegon adalah dua daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi terendah di Tahun 2016, namun pada tahun 2018 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon Mengalami kenaikan dan tumbuh sebesar 5,96%, untuk Kota Tangerang masih yang terendah hanya tumbuh sebesar 5,38%. Sementara Kota Tangerang Selatan adalah daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sekitar 8,51% pada tahun 2018.

Tabel 3.3

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2015-2018 (dalam %)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018*
01 Kab. Pandeglang	5.01	5.97	6.01	6.31	6.43
02 Kab. Lebak	6.04	5.93	5.75	6.04	6.16
03 Kab. Tangerang	5.76	5.39	5.17	5.64	5.69
04 Kab. Serang	5.99	5.14	5.04	5.39	5.50
05 Kota Tangerang	5.64	5.58	5.03	5.23	5.38
06 Kota Cilegon	4.93	4.81	4.71	5.42	5.96
07 Kota Serang	7.07	6.43	6.37	7.13	8.20
08 Kota Tangsel	8.50	7.25	7.10	7.81	8.51

Keterangan: angka Tahun 2016*, 2017*, dan 2018* adalah hasil proyeksi Bappeda Provinsi Banten

Sumber : BPS dan RPJMD Provinsi Banten 2012-2017

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada Tahun 2015-2016 terjadi perlambatan sebesar 0,14% (5,40 ke 5,26) hal ini disebabkan krisis ekonomi global sampai saat ini belum selesai di berbagai belahan dunia

terutama di Negara-Negara Eropa. Krisis tersebut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional dan regional di seluruh Indonesia. Provinsi Banten dikenal sebagai Provinsi industri dimana hampir semua perusahaan besar yang ada pangsa pasarnya adalah Negara-Negara Eropa, dikarenakan sampai hari ini kondisi ekonomi Negara-Negara tersebut belum menunjukkan perbaikan maka permintaan terhadap produk-produk industri Banten sampai saat ini masih melemah. Kondisi ini dibuktikan dengan selisih ekspor impor dua tahun terakhir ini tidak begitu menggembirakan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di provinsi Banten.

Namun demikian perkembangan ekonomi dunia Tahun 2018 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan Tahun 2016-2017, adapun yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2018 adalah prospek dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi. Perkembangan ekonomi nasional juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi ditopang oleh konsumsi dan investasi Pemerintah sebagaimana tercermin pada percepatan belanja modal awal Tahun 2017.

Investasi diperkirakan juga akan tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan dukungan dari Pemerintah. Rating investasi Indonesia juga mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia yang cukup stabil ditengah ketidakpastian eksternal, disertai dengan kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang proaktif. Sementara kinerja ekspor diperkirakan tumbuh terbatas seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang masih moderat. Namun demikian proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten Tahun 2018 diperkirakan tumbuh dikisaran 5,85%.

Perkembangan perekonomian di Provinsi Banten akan menarik investasi lebih besar dengan terus naiknya PMA dan PMDN. Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN ini lebih banyak fokus kepada industri manufaktur dan jasa, sektor industri untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri kecil dan menengah. Kedua sektor andalan Provinsi Banten tersebut (UMKM-K dan Industri) apabila terus dipacu untuk berkembang maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi di Provinsi Banten yang cukup baik apabila terus dipertahankan dan ditingkatkan maka akan mengundang banyak investor untuk terus menanamkan modalnya di Provinsi Banten. Kemudian untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga kerja yang terampil.

Selain faktor investasi dan tenaga terampil tersebut, faktor konsumsi masyarakat juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, semakin tinggi konsumsi masyarakat maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi publik maupun swasta. Tren positif kondisi perekonomian Banten ini akan semakin menarik investor untuk berinvestasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
di Provinsi Banten Tahun 2013- 2017

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (milyar rupiah)	Proyek	Investasi (US\$. Juta)
2013	100	4.008,66	592	3.720,2
2014	100	8,081.3	709	2,034.6
2015	367	10,709.9	1.737	2,542.0
2016	496	12,426.3	2.161	2,912.1
2017	699	15.141,9	2.479	3,047.5

Sumber: BKPM RI Tahun 2017

Pada tahun 2017, untuk PMDN Banten masuk peringkat lima setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara kumulatif sepanjang Januari-Desember 2017, realisasi investasi mencapai Rp 15.141,9 triliun, dibanding capaian tahun 2016 sebesar Rp 12.426,3 triliun. Ada pun periode januari – desember 2017 menjadi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 3.047,5 triliun dibanding capaian 2016 sebesar Rp 2.912,1 triliun.

b. Inflasi

1. Inflasi Menurut Pengeluaran

Memasuki bulan Januari tahun 2018, harga barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 138,47 pada bulan Desember menjadi 138,77 pada bulan Januari atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,22 persen.

Enam dari tujuh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks, yaitu berturut-turut: kelompok bahan makanan yang naik sebesar 1,26 persen, kelompok sandang naik sebesar 0,24 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik sebesar 0,22 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar naik sebesar 0,16 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang naik sebesar 0,11 persen, serta kelompok kesehatan naik sebesar 0,10 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,97 persen.

Tabel 3.5

IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten

Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Januari 2018 (2012=100)

Kelompok Pengeluaran (1)	IHK Januari 2017 (2)	IHK Desember 2017 (3)	IHK Januari 2018 (4)	Inflasi Januari 2018 *) (5)	Laju Inflasi Tahun 2018 **) (6)	Inflasi "Year on Year" ***) (7)
U M U M	134,13	138,47	138,77	0,22	0,22	3,47
1. Bahan Makanan	147,89	148,93	150,81	1,26	1,26	1,98
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	146,76	153,88	154,06	0,11	0,11	4,97
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	125,12	130,14	130,35	0,16	0,16	4,18
4. Sandang	111,97	114,64	114,91	0,24	0,24	2,63
5. Kesehatan	131,31	135,57	135,71	0,10	0,10	3,35
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	127,73	136,08	136,38	0,22	0,22	6,77
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	128,14	130,96	129,69	-0,97	-0,97	1,21

Sumber: BPS Provinsi Banten
 Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

2. Perkembangan Inflasi Kota Serang, Kota Tangerang, dan Cilegon Bulan Januari 2018

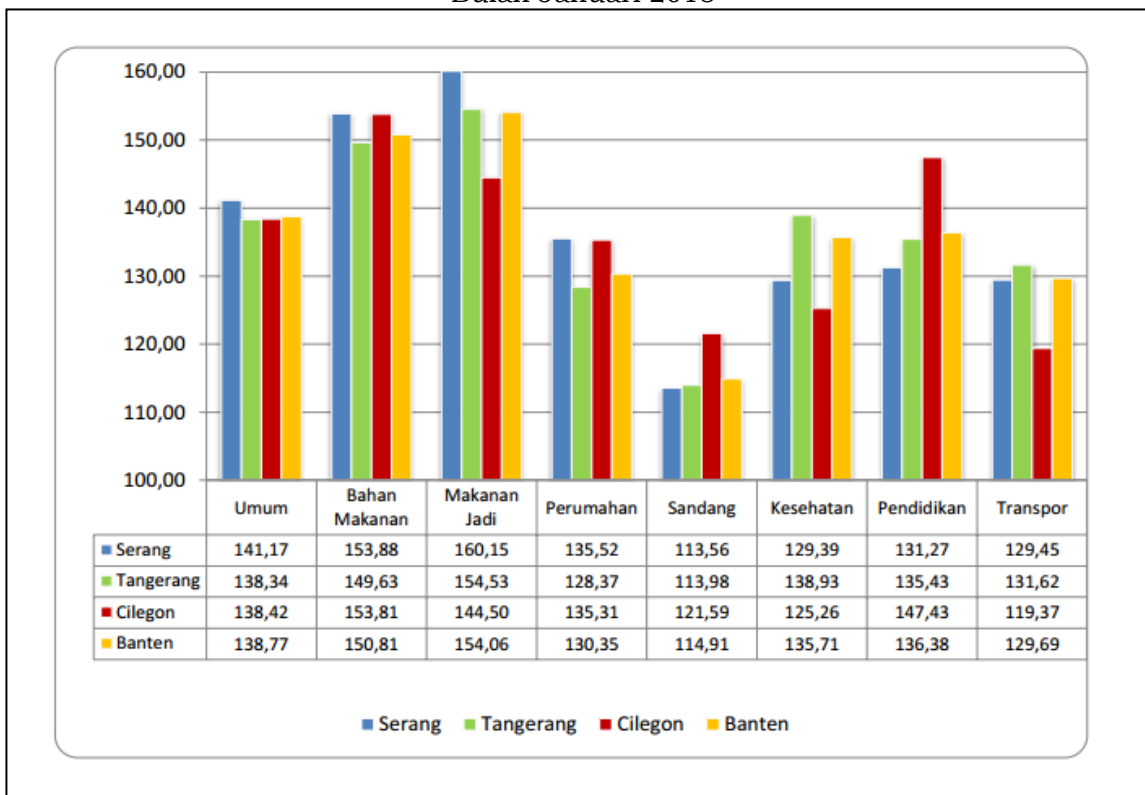
Pada bulan Januari 2018, perkembangan harga barang dan jasa (inflasi) di 3 (tiga) kota IHK di Banten adalah sebagai berikut : Kota Serang 0,91 persen, Kota Tangerang 0,04 persen dan Kota Cilegon 0,41 persen. Laju inflasi tahun kalendernya adalah Kota Serang 0,91 persen; Kota Tangerang 0,04 persen dan Kota Cilegon 0,41 persen.

Tabel 3.6
IHK, Inflasi, Laju Inflasi Kota Serang, Tangerang dan Cilegon
Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Januari 2018 (2012 = 100)

Kelompok Pengeluaran	Serang			Tangerang			Cilegon		
	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)	IHK Januari 2018	Inflasi Januari 2018 *)	Inflasi Tahun Kalender **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
U M U M	141,17	0,91	0,91	138,34	0,04	0,04	138,42	0,41	0,41
1. Bahan Makanan	153,88	2,56	2,56	149,63	0,96	0,96	153,81	1,40	1,40
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	160,15	0,54	0,54	154,53	0,03	0,03	144,50	0,04	0,04
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	135,52	1,03	1,03	128,37	0,02	0,02	135,31	-0,09	-0,09
4. Sandang	113,56	0,34	0,34	113,98	0,28	0,28	121,59	-0,12	-0,12
5. Kesehatan	129,39	0,19	0,19	138,93	0,04	0,04	125,26	0,36	0,36
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	131,27	-0,02	-0,02	135,43	0,32	0,32	147,43	-0,01	-0,01
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	129,45	-0,15	-0,15	131,62	-1,33	-1,33	119,37	0,28	0,28

Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

Gambar 3.4
Perkembangan IHK Kota Serang, Tangerang, Cilegon dan Banten (2012=100)
Bulan Januari 2018



Sumber: BPS Provinsi Banten
Nomor: 18/04/36/Th.XII, 2 April 2018

Tabel 3.7
Proyeksi Inflasi Provinsi Banten
Tahun 2017-2018 (%)

Indikator	2016	2017 (Angka Proyeksi)*			2018 (Angka Proyeksi)*		
		Optimis	Moderat	Pesimis	Optimis	Moderat	Pesimis
Inflasi (Persen)	2.77	3.00	4.00	5.00	2.94	4.50	5.50

*Keterangan: * adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten*

Sumber: No. 06/02/36/Th.XI, 1 Februari 2017

c. ICOR

1. Nilai ICOR Total

Pertumbuhan ekonomi Banten selama periode Tahun 2014-2017 rata-rata sebesar 5,42 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 5,51 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 5,26 persen. Sedangkan nilai PDRB Banten (adh Berlaku) selama periode Tahun 2014-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari 428.740,06 miliar rupiah menjadi 563.820,35 miliar rupiah.

Adapun pengeluaran untuk kapital (PMTB) selama periode Tahun 2014-2016 memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 32-34 persen, dengan nilai rata-rata sebesar 92.388,650 miliar rupiah. Data pada tabel 3.8 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 dengan proyeksi Tahun 2018 cenderung meningkat dari 2,91 persen (2014) menjadi 5,16 persen (2016).

Tabel 3.8
Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Banten, Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017 (Angka Proyeksi)*	2018 (Angka Proyeksi)*
1. PMTB adhb	124,100,207	139,910,911	152,042,587	168,062,707	188,102,025
a. Bangunan					
a. 1. Nilai (Juta Rupiah)	81,902,666	92,729,170	102,534,116		
a. 2. Persentase	66.00	66.28	67.44		
b. Non Bangunan					
b. 1. Nilai (Juta Rupiah)	42,197,541	47,181,741	49,508,471		
b. 2. Persentase	34.00	33.72	32.56		

Uraian	2014	2015	2016	2017 (Angka Proyeksi)*	2018 (Angka Proyeksi)*
2. PMTB adhk 2010	103,115,307	108,982,067	114,601,617	120,629,119	127,290,865
a. Bangunan					
a. 1. Nilai (Juta Rupiah)	69,848,849	74,592,481	79,620,457		
a. 2.Persentase	67.74	68.44	69.48		
b. Non Bangunan					
b. 1. Nilai (Juta Rupiah)	33,266,458	34,389,587	34,981,160		
b. 2.Persentase	32.26	31.56	30.52		
3. Pertumbuhan PMTB adhk 2010 (Persen)	2.91	5.69	5.16	5.26	5.52
a. Bangunan	4.31	6.79	6.74		
b. Non Bangunan	0.10	3.38	1.72		

Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Banten proyeksi*

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode Tahun 2014–2016. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada Tahun 2014 sebesar 4,31 persen. Keadaan ini meningkat di Tahun 2016 yaitu menjadi 6,74 persen, meskipun pada Tahun 2015 sempat pulih hingga mencapai pertumbuhan sebesar 6,79 persen. Sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang tidak jauh berbeda dengan bangunan. Pada Tahun 2014 sub komponen non bangunan tumbuh sebesar 0,10 persen. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya mulai meningkat menjadi sebesar 3,38 persen (2015), sedangkan pada Tahun 2016 menurun sebesar 1,72 persen.

Secara umum, selama kurun waktu Tahun 2014-2016 pertumbuhan PMTB terus mengalami peningkatan di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yang mencapai besaran 5,69 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2014 yaitu hanya sebesar 2,91 persen, dengan proyeksi Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 5,26%.

2. Nilai ICOR Sektoral

Sebagaimana diketahui koefisien ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital

(investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit *output*. Dalam pembahasan ini tambahan kapital (investasi) baru adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan *output*. Karena unit PMTB bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit *output* relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Tabel 3.9 menunjukkan besaran koefisien ICOR akumulasi periode Tahun 2010-2014 di Provinsi Banten menurut kategori industri. Kategori yang mempunyai koefisien ICOR paling kecil adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan koefisien ICOR hanya 0,87. Artinya setiap penambahan Rp1 miliar *output* hanya memerlukan PMTB sebesar 870 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi pada pertanian, kehutanan, dan perikanan sangat efisien, karena untuk meningkatkan *ouputnya* memerlukan investasi fisik (PMTB) yang lebih sedikit. Berikutnya kategori dengan koefisien ICOR kurang dari 2 adalah kategori Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi kendaraan (1.17), jasa keuangan (1.53), dan kategori konstruksi (1,84). Kategori industri dengan koefisien ICOR antara 2 (dua) dan 3 (tiga) berikutnya adalah kategori *real estate* (2,18), jasa lainnya (2.73), serta kategori jasa perusahaan (2,78).

Dalam hal ini dapat dilihat juga rata ICOR secara keseluruhan periode Tahun 2011-2015, Tahun 2012-2016, dan persentase proyeksi Tahun 2013-2017.

Tabel 3.9
Koefisien ICOR Akumulasi Tahun 2010-2014
di Provinsi Banten Menurut Kategori

ICOR lag 5 Tahun Menurut Katagori		2010-2014
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,87
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,20
3.	Industri Pengolahan	7,06
4.	Pengadaan Listrik, Gas	8,74
5.	Pengadaaan Air	6,80
6.	Konstruksi	1,84
7.	Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Kendaraan	1,17
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,58
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66
10.	Informasi dan Komunikasi	5,01
11.	Jasa Keuangan	1,53
12.	Real Estate	2,18

13.	Jasa perusahaan	2,78
14.	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,18
15.	Jasa Pendidikan	3,92
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,69
17.	jasa Lainnya	2,73
Total		4,55

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Kategori industri yang lainnya mempunyai koefisien ICOR lebih besar dari 3 (tiga). Dapat dikatakan bahwa kegiatan investasi/PMTB pada kategori industri tersebut kurang efisien jika dibandingkan dengan kategori industri yang tersebut di atas. Kategori industri transportasi dan pergudangan, serta kategori administrasi pemerintahan umum dan jaminan sosial wajib mempunyai koefisien ICOR yang besar yaitu 10,58 dan 13,18. Artinya PMTB pada kedua sektor tersebut tidak efisien. Khusus untuk kategori administrasi pemerintah ketidakefisienan investasi pada kategori ini menyangkut investasi besar pada sektor layanan dan fasilitas umum dimana nilai *outputnya* dijual dibawah harga pasar, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, serta konstruksi publik lainnya.

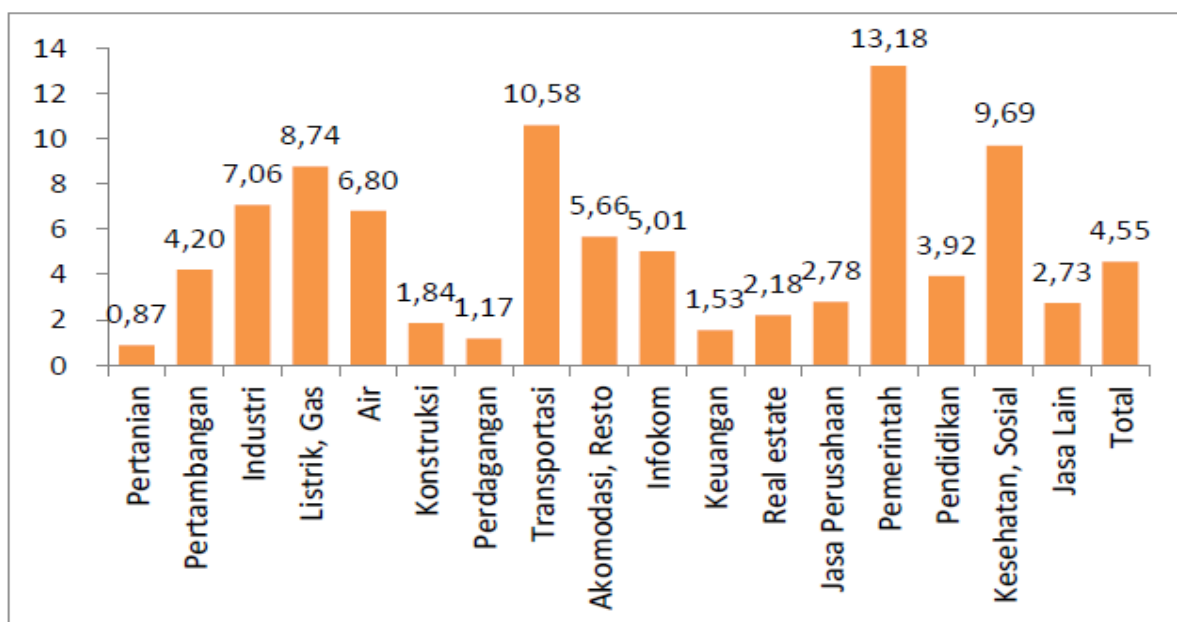
Tabel 3.10
Koefisien ICOR Akumulasi Tahun 2010-2017
di Provinsi Banten Menurut Kategori

Indikator	2010-2014	2011-2015	2012-2016	Angka Proyeksi 2013-2017	Angka Proyeksi 2014-2018
ICOR Tahunan	4.97	5.14	5.39	5.56	5.65

Sumber : Bappeda Provinsi Banten proyeksi

Gambar 3.5

Grafik Nilai ICOR Akumulasi Tahun 2010-2014 Provinsi Banten



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Perkembangan ICOR lag 0 dari Tahun 2010 hingga Tahun 2014 di Provinsi Banten. Koefisien ICOR yang terbentuk mengalami fluktuasi pada beberapa tahun, dimana penurunan ICOR terjadi pada Tahun 2011 dari 4,88 menjadi 4,65, serta Tahun 2013 dari 4,87 menjadi 4,53. Sementara kenaikan tertinggi koefisien ICOR terjadi pada Tahun 2014 dari 4,53 tahun sebelumnya menjadi 5,69, Hal ini kemungkinan terjadi karena situasi ekonomi global yang mempengaruhi proses produksi domestik ditambah situasi politik dalam negeri yang sedang melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Tabel 3.11

Nilai Koefisien ICOR Lag 0 Menurut Kategori
Provinsi Banten Tahun 2010-2014

ICOR lag 0 Menurut Katagori		2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1		2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41	1,18	1,09	0,80	1,82	1,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	7,59	0,37	(27,31)	(0,57)	0,24	2,73
3.	Industri Penolahan	9,08	6,49	8,16	3,79	123,72	6,88
4.	Pengadaan Listrik, Gas	1,08	43,78	8,80	(29,29)	10,57	6,82
5.	Pengadaaan Air	5,92	2,90	36,64	9,33	7,39	12,44
6.	Konstruksi	3,61	2,42	2,06	1,71	1,29	2,22
7.	Perdagangan Besar, Eceram, dan Reparasi Kendaraan	1,34	0,83	1,07	1,78	1,72	1,35

ICOR lag 0 Menurut Katagori		2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,91	9,37	7,72	17,70	14,41	12,02
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,72	5,60	9,63	10,25	4,45	7,13
10.	Informasi dan Komunikasi	5,07	7,45	5,24	8,91	4,20	6,17
11.	Jasa Keuangan	2,54	1,22	1,29	1,52	1,52	1,62
12.	Real Estate	1,78	2,55	2,69	3,10	2,13	2,45
13.	Jasa perusahaan	3,27	3,11	3,40	4,13	2,04	3,19
14.	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,82	25,33	16,59	92,11	7,10	31,39
15.	Jasa Pendidikan	3,43	4,71	5,21	7,53	4,72	5,12
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,39	11,07	5,52	31,02	11,25	15,45
17.	jasa Lainnya	3,22	3,80	4,13	3,91	1,59	3,93
Total		4,88	4,65	4,87	4,53	5,69	4,92

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Pada ICOR log 0, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kategori industri yang memiliki efisiensi investasi yang paling efisien dengan rata-rata koefisien ICOR sebesar 1,06, disusul kemudian oleh kategori perdagangan besar dan eceran, serta reparasi kendaraan dengan rata-rata ICOR sebesar 1,35, serta kategori jasa keuangan dengan rata-rata ICOR sebesar 1,62. Sementara kategori dengan rata-rata ICOR besar, terdapat pada kategori Administrasi Pemerintahan Umum (31,39), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (15,45), serta kategori pengadaan air bersih (12,44).

Tabel 3.12
Nilai Koefisien ICOR

Provinsi Banten Tahun Proyeksi Tahun 2015–2018

Indikator	2015	2016	2017 (Angka Proyeksi)	2018 (Angka Proyeksi)
ICOR Tahunan	5.78	5.91	5.66	5.32

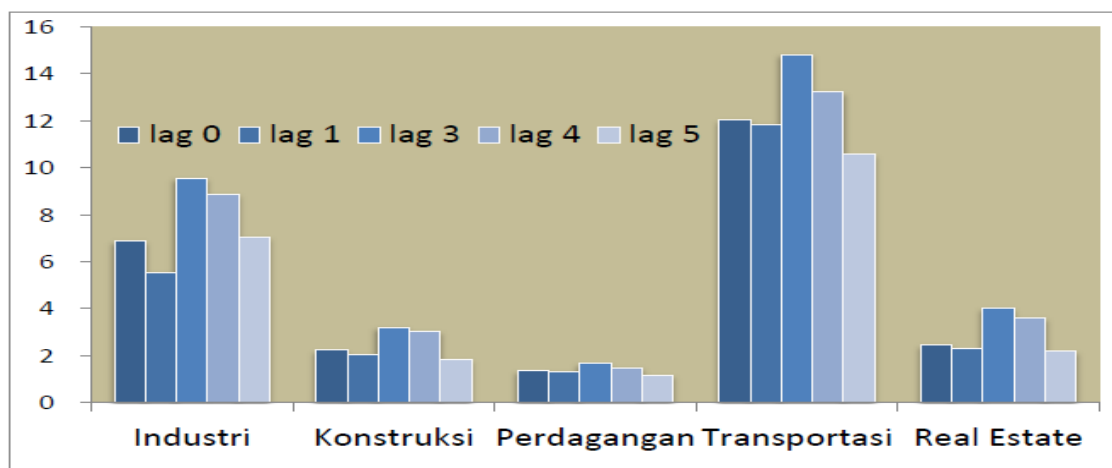
Perekonomian Banten selama periode Tahun 2010-2014 didominasi oleh aktifitas kategori manufaktur, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan real estate hingga sebesar 71 persen dari total PDRB Banten. Dari kelima kategori industri utama tersebut kategori perdagangan besar eceran, dan reparasi kendaraan serta merupakan kategori paling efisiensi dalam investasi dibandingkan kategori utama lainnya pada berbagai lag ICOR yang diamati. Sedangkan kategori industri manufaktur atau industri pengolahan sebagai kategori terbesar dalam pembentukan PDRB Banten ternyata kurang efisien dilihat dari koefisien ICOR baik di lag 0 (nol), lag 3 (tiga), maupun lag 5 (lima).

Namun demikian perkembangan ICOR setiap Tahunnya akan mengalami peningkatan pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, namun

proyeksi Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,66% dan proyeksi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,32%.

Gambar 3.6

Grafik Perbandingan ICOR Kategori Utama Menurut Lag



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2001-2014

Kecenderungannya semakin panjang lag, semakin efisien investasi yg dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Banten mulai melambat dari 7,03 persen di Tahun 2011 menjadi 6,83 persen, padahal arus investasi masih tinggi di Tahun 2012-2013 terutama investasi pada industri padat modal seperti industri logam dasar, dan barang dari logam. Akibatnya nilai koefisien ICOR naik pada lag 3 (tiga) dan turun kembali pada lag 4 (empat) dan lag 5 (lima).

Peningkatan efisiensi pada beberapa sektor dapat dikurangi dengan melancarkan transportasi dan komunikasi agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Peningkatan infrastruktur transportasi dan komunikasi merupakan upaya pembangunan yang tepat dengan disertai ketepatan lokasi alokasinya.

Mengingat nilai ICOR yang masih cukup tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada struktur usaha di Provinsi Banten, perlu rekayasa teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat Provinsi Banten.

d. Ketenagakerjaan

Pada periode Agustus Tahun 2016-Agustus Tahun 2017 jumlah angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan dari 5,59 juta orang pada Agustus Tahun 2016 menjadi 5,60 juta orang pada Agustus Tahun 2017. Namun sayangnya, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pengangguran sebesar 21 ribu pada periode tersebut. Jumlah penduduk bekerja justru mengalami penurunan dari 5,09 juta orang menjadi 5,08 juta orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari 63,66 persen menjadi 62,32 persen. Menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja ini merupakan indikasi adanya penurunan suplai tenaga kerja.

Tabel 3.13

Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Februari Tahun 2016-Agustus Tahun 2017

	Jenis Kegiatan Utama	2016		2017	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1.	Penduduk 15+ (000)	8.673	8.775	8.879	8.981
2.	Angkatan Kerja	5.686	5.587	5.969	5.597
	Bekerja (000)	5.234	5.088	5.507	5.077
	Penganggur(000)	452	499	462	520
3.	Bukan Angkatan Kerja (000)	2.987	3.188	2.909	3.384
	Sekolah	875	722	731	852
	Mengurus Rumah Tangga	1.748	2.066	1.845	2.133
	Lainnya	363	399	333	399
4.	TPAK (%)	65,56	63,66	67,23	62,32
5.	TPT (%)	7,95	8,92	7,75	9,28
6.	Pekerja tidak penuh/Setengah Pengangguran	1.089	936	1.086	864
	Setengah penganggur/ST Terpaksa	407	398	317	249
	Paruh Waktu/SP Sukarela	681	537	769	615

Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

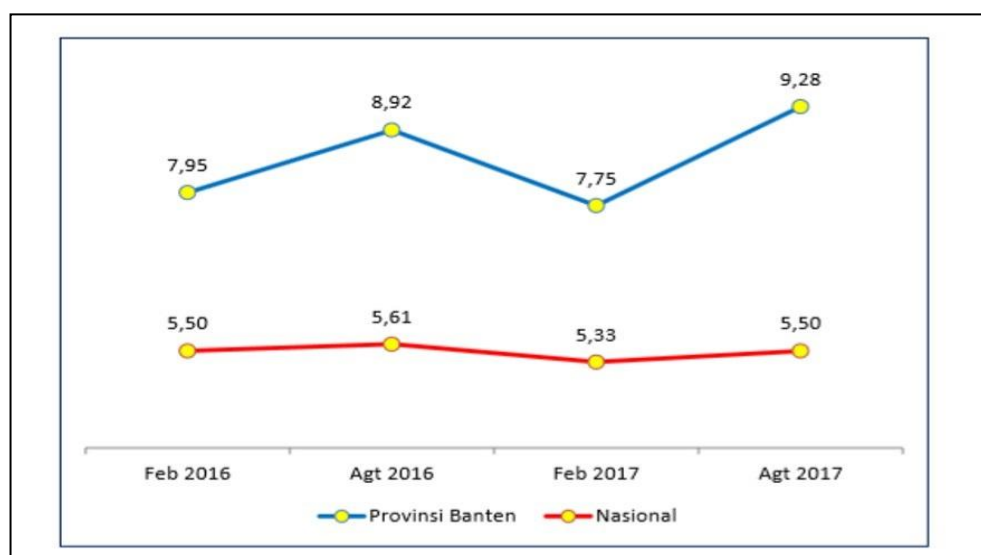
Indikator lain adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Indikator ini dapat menggambarkan ternyata tidak semua

memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran: yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Agustus Tahun 2017, setengah pengangguran berjumlah 864 ribu atau 17,02 persen dari penduduk bekerja. Sedikit menurun dibanding Agustus Tahun 2016 yang sebanyak 936 ribu (18,40 persen).

Setengah pengangguran terpaksa menurun selama satu tahun dari 398 ribu pekerja menjadi 249 ribu pekerja.

Gambar 3.7

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten dan Nasional, Februari Tahun 2016-Tahun Agustus 2017 (persen)



Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

Secara relatif angka pengangguran menunjukkan peningkatan dari 8,92 persen pada Agustus Tahun 2016 menjadi 9,28 persen pada bulan Agustus Tahun 2017. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi dibanding angka pengangguran nasional. Pada Agustus Tahun 2017, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat kedua tertinggi nasional setelah Provinsi Maluku. Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di

Banten. Kondisi terbaru angka pengangguran di Banten mengalami penurunan yang signifikan menjadi 7,77 persen pada Februari Tahun 2018 dibandingkan pada bulan Agustus Tahun 2017 yang mencapai 9,28 persen.

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu). Dikatakan lebih mendalam karena mampu mengungkap dibalik status bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah. Ada dua kelompok setengah pengangguran, yaitu yang masih mencari kerja (setengah pengangguran terpaksa) dan tidak mencari kerja lagi (setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu). Pada Agustus Tahun 2016, setengah pengangguran berjumlah 936 ribu atau 18,39 persen dari penduduk bekerja. Menurun dibanding Februari Tahun 2016 yang sebanyak 1.089 ribu (20,81 persen). Ini merupakan indikasi yang merepresentasikan naiknya produktivitas. Dari dua jenis setengah pengangguran, Setengah pengangguran terpaksa menurun selama satu semester dari 407 ribu pekerja menjadi 398 ribu pekerja.

Dilihat dari sisi komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari kerja di Provinsi Banten umumnya berpendidikan menengah. Persentase pencari kerja yang berpendidikan tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dari 7,86 persen menjadi 8,03 persen dari total penduduk bekerja. Begitu juga, persentase pengangguran yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) mengalami kenaikan dari 41,28 persen menjadi 48,17 persen. Sebaliknya pencari kerja pendidikan rendah mengalami penurunan (SMP ke bawah) dari 50,85 persen menjadi 43,80 persen.

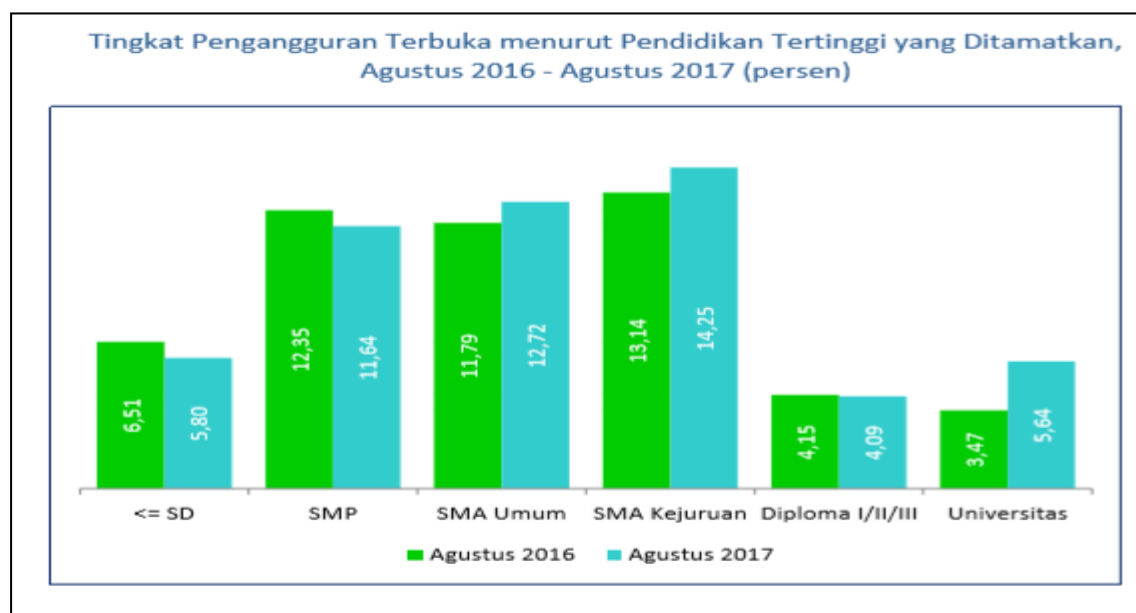
Tabel 3.14

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja				Pengangguran			
	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017	Agustus 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SD Ke bawah	34,73	34,45	36,43	36,12	32,19	24,48	23,04	21,72
SMP	15,85	16,73	16,85	17,15	18,66	24,07	18,28	22,08
SMA	20,46	18,57	16,91	19,60	17,64	25,34	23,16	27,91
SMK	13,03	12,53	12,90	12,47	23,64	19,34	23,63	20,26
Diploma I/II/III	3,75	3,65	4,67	3,16	2,00	1,61	4,10	1,32
Universitas	12,18	14,07	12,24	11,50	5,86	5,16	7,80	6,71
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

Dilihat dari lulusan jenjang pendidikan, lulusan SMK paling banyak yang berstatus sebagai pencari kerja (14,25 persen). Angka ini lebih banyak dari lulusan SMU yang 12,72 persen. Lulusan perguruan tinggi lebih mudah terserap di pasar kerja, hanya 4,09 persen lulusan Diploma dan 5,64 persen lulusan Sarjana yang menganggur. Pada lulusan pendidikan rendah (SD ke bawah) juga banyak terserap di lapangan kerja tetapi mereka biasanya adalah pekerja informal dan bukan *new entry*.

Gambar 3.8



Sumber : BRS No. 66/11/36/Th.XI, 6 November 2017

e. Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret Tahun 2017 sebesar 5,45 persen. Angka ini berarti terjadi kenaikan 0,09 poin dibanding semester sebelumnya yang 5,36 persen.

Kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,09 poin sejalan dengan penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September Tahun 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada Maret Tahun 2017.

Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada September Tahun 2016 menjadi 7,61 pada Maret Tahun 2017.

Jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Di perkotaan bertambah 10,9 ribu orang (dari 380,16 ribu orang pada September Tahun 2016 menjadi 391,03 ribu orang pada Maret Tahun 2017). Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 6,4 ribu orang (dari 277,58 ribu orang pada September Tahun 2016 menjadi 284,00 ribu orang pada Maret Tahun 2017).

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret Tahun 2017 mencapai 5,45 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September Tahun 2016, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,09 poin setelah rilis semester sebelumnya menunjukkan angka 5,36 persen. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,49 menjadi 4,52 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,32 pada September Tahun 2016 menjadi 7,61 pada Maret Tahun 2017.

Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama terjadi penambahan sebesar 17,3 ribu orang dari 657,74 ribu orang pada September Tahun 2016 menjadi 675,04 ribu orang pada bulan Maret 2017.

Tabel 3.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
September Tahun 2016-Maret Tahun 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
September 2016	380,16	4,49
Maret 2017	391,03	4,52
<u>Perdesaan</u>		
September 2016	277,58	7,32
Maret 2017	284,00	7,61
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
September 2016	657,74	5,36
Maret 2017	675,04	5,45

Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

Faktor-faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan di Banten periode September Tahun 2016-Maret Tahun 2017 diantaranya adalah:

1. Inflasi umum September Tahun 2016-Maret Tahun 2017 sebesar 2,52 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum Maret-September Tahun 2016 sebesar 0,92.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator proxy kesejahteraan petani, pada periode Maret Tahun 2017 hanya sebesar 98,19. NTP dibawah 100 berarti petani mengalami defisit, pendapatan yang diterima lebih rendah daripada pengeluarannya. Sedangkan NTP periode September Tahun 2016 mencapai 100,47.

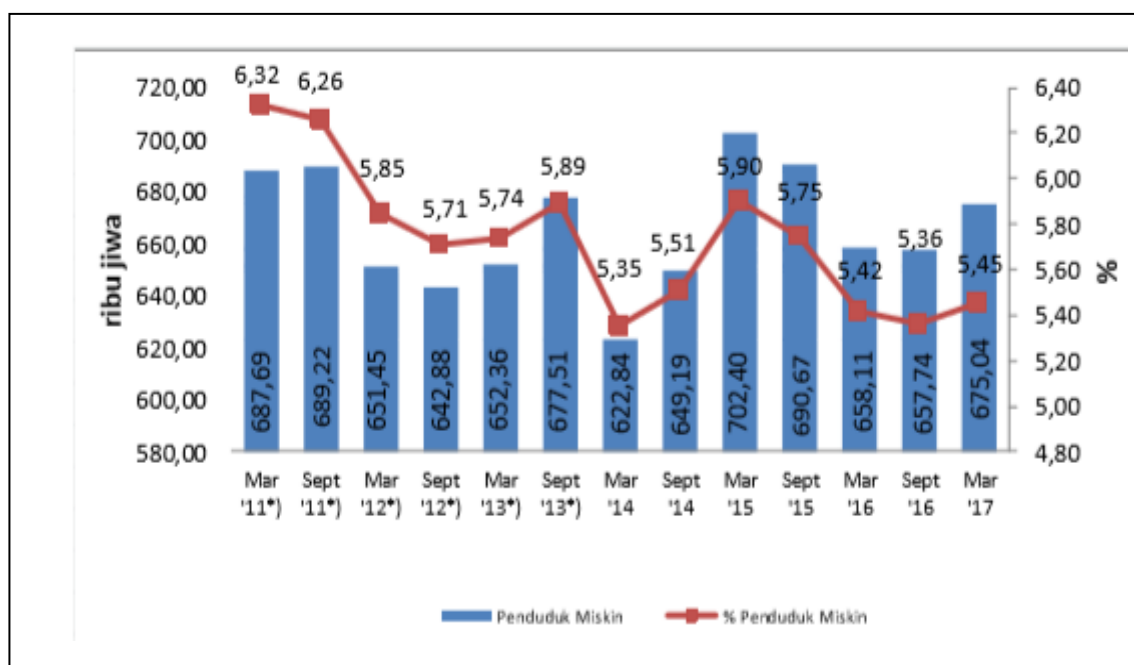
Selang periode Maret Tahun 2011 sampai Maret Tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten cukup fluktuatif. Pada September Tahun 2013, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,86 persen dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan inflasi umum yang relatif tinggi akibat kenaikan harga BBM pada bulan Juli Tahun 2013. Namun, pada Maret Tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu dari 677,51 ribu orang pada September Tahun 2013 menjadi 622,84 ribu orang.

Penduduk miskin di Provinsi Banten pada September Tahun 2014 bertambah 4,23 persen dibanding periode sebelumnya. Periode Maret Tahun 2015 jumlah penduduk miskin masih mengalami kenaikan sebesar 53,21 ribu orang. Pada periode-periode selanjutnya, penduduk miskin di Banten terus mengalami penurunan, hingga pada September Tahun 2016 persentase penduduk miskin mencapai 5,36 persen atau berkurang

sebanyak 370 orang. Keadaan kemiskinan periode Maret Tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Banten kembali meningkat sebanyak 17,3 ribu orang dari periode sebelumnya menjadi 675,04 ribu orang.

Gambar 3.9

Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, Tahun 2011-Tahun 2017



Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3.16 menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada periode September Tahun 2016-Maret Tahun 2017.

Selama periode September Tahun 2016-Maret Tahun 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,59 persen, yaitu dari Rp373.365,00 per kapita per bulan pada September Tahun 2016 menjadi Rp386.753,00 per kapita per bulan pada Maret Tahun 2017. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM terhadap GK pada Maret Tahun 2017 adalah sebesar 70,47 persen mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September Tahun 2016 yang sebesar 70,29 persen.

Tabel 3.16
Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah
September Tahun 2016-Maret Tahun 2017

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
September 2016	261.285	121.618	382.903
Maret 2017	271.751	124.857	396.608
Perubahan (%)	4,01	2,66	3,58
<u>Perdesaan</u>			
September 2016	264.755	86.952	351.708
Maret 2017	274.157	89.431	363.588
Perubahan (%)	3,55	2,85	3,38
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
September 2016	262.442	110.923	373.365
Maret 2017	272.552	114.201	386.753
Perubahan (%)	3,85	2,96	3,59

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) September 2016-Maret 2017

Sumber : BRS No 40/07/36/Th.XI, 17 Juli 2017

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2018

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah

dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2018

Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	FINALISASI RKPD 2018 (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	10.365.616.979.717,00	10.477.855.594.717,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.183.868.751.717,00	6.296.107.366.717,00
4.1.1	Pajak Daerah	5.836.683.600.000,00	5.942.765.440.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	20.177.648.520,00	19.826.483.520,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	54.644.492.380,00	54.644.492.380,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	272.363.010.817,00	278.870.950.817,00
4.2	Dana Perimbangan	4.176.078.228.000,00	4.176.078.228.000,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.384.582.000,00	707.384.582.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.072.903.468.000,00	1.072.903.468.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.395.790.178.000,00	2.395.790.178.000,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	11.362.380.964.717,00	11.030.264.730.612,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	6.704.423.824.437,00	6.963.562.820.612,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.757.664.017.909,00	1.875.164.017.909,00

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	FINALISASI RKPD 2018 (Rp)
5.1.2	Belanja Hibah	2.153.751.721.820,00	2.132.051.721.820,00
5.1.3	Belanja Bantuan Sosial	67.790.400.000,00	69.735.000.000,00
5.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	2.213.484.881.366,00	2.400.518.604.483,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	460.506.831.000,00	464.093.476.400,00
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	51.225.972.342,00	22.000.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	4.657.957.140.280,00	4.066.701.910.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai	273.413.783.100,00	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.195.894.937.116,00	-
5.2.3	Belanja Modal	2.188.648.420.064,00	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(996.763.985.000,00)	(552.409.135.895,00)
6	PEMBIAYAAN	996.763.985.000,00	552.409.135.895,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	996.763.985.000,00	752.409.135.895,00
6.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	996.763.985.000,00	752.409.135.894,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	200.000.000.000,00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Banten Tbk	-	200.000.000.000,00
7	SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	0	0